BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Makassar

Kota Makassar pada masa H.M.Daeng Patompo (1965-1978) menjabat Walikota Madya Makassar, yaitu pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar biasa juga disebut Kota *Daeng* atau Kota *Anging Mamiri*. *Daeng* adalah salah satu gelar dalam strata atau tingkat masyarakat di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada umumnya, *Daeng* dapat pula diartikan "kakak". Ada tiga klasifikasi "Daeng", yaitu: nama gelar; panggilan penghormatan; panggilan umum.

Sedang *Anging Mamiri* artinya "angin bertiup" adalah salah satu lagu asli daerah Makassar ciptaan Borra Daeng Ngirate yang sangat populer pada tahun 1960-an. Lagu ini sangat disukai oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.Soekarno ketika berkunjung ke Makassar pada tanggal 5 Januari 1962.

Dalam kehadirannya, Kota Makassar mempunyai pengalaman sejarah tersendiri yang sangat berkaitan dengan sejarah Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya sebagai bagian dari suatu keterikatan baik dalam geologi, iklim, fauna, flora, dan penduduk yang keseluruhannya adalah ciptaan ALLAH S.W.T, maupun keterikatan dalam tingkat kehidupan dalam masyarakat, budaya dan sistem pemerintahannya. Seperti diketahui, Sulawesi Selatan terdiri atas empat

rumpun suku, yaitu : Makassar, Bugis, Mandar, dan Massenrempulu (Luwu, Enrekang, Toraja, Pattinjo, Pattae). Menurut penelitian para sejarawan, pada zaman prasejarah, perkembangan manusia di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan pada tingkat kehidupan perundagian (zaman pertukangan) dengan ditemukannya perkakas peninggalan masa lampau berdasarkan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh beberapa ahli prasejarah, antara lain adalah:

- a. Fritz Sarasin atau Karl Friedrich Sarasin [3 Desember 1859 23 Maret 1942] dan Paul Benedict Sarasin [11 Desember 1856 7 April 1929] dua bersaudara bangsa Swiss, mengunjungi Sulawesi Selatan dari tahun 1893 1896 dan 1901-1903, melakukan kerja pemetaan geografi dan geologi di daerah yang belum pernah diteliti dan menemukan budaya suku Toala (Pannei) di Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, termasuk suku Toala di Gua Lamoncong, Bone. Toala adalah suatu suku penduduk keturunan langsung dari zaman Prasejarah termasuk dalam zaman batu tengah yang hidup dalam gua –dalam bahasa Bugis, Toala (To-ala) mempunyai arti "orang hutan", "To" artinya orang dan "ala" artinya hutan-. Oleh Van Stein Callenfels menetapkan umur budaya Toala 300 500 S.M. Selain itu, Sarasin bersaudara melakukan penelitian di Danau Matano dan menemukan kelompok hewan air tawar yang bersifat tripoblastik slomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler (Mollusca) \
- b. H.R.van Heekeren [23 Juni 1902 10 September 1974], mengadakan penelitian di Sulawesi Selatan. Di Cabbenge (Soppeng) ditemukan fosil hewan pertama serta alat-alat serpih dan kapak perimbas yang berasal dari

kala Pliosen Akhir. Di Leang Codong dekat Citta Soppeng, dalam tahun 1937 ditemukan 2.700 buah gigi yang diperkirakan mewakili 2.657 orang yang berasal dari masa Holosin. H.R.van Heekeren melanjutkan penelitian di Kabupaten Maros yaitu di Goa Saripa, ditemukan banyaknya mata panah yang disebut Lancipan Maros.

- c. Dr. P. van Stein Callenfels [4 September 1883 26 April 1938] melakukan ekskavasi di daerah Bantaeng dan Gua Batu Ejaya, ditemukan antara lain mata-uang Belanda, gerabah, dan beliung persegi. Di samping itu, ditemukan juga sebuah gelang perunggu, oleh van Stein Callenfels menetapkan umur lapisan 300 S.M.
- d. Tahun 1910 1916 Dr. P. van Stein Callenfels didampingi penduduk setempat melakukan penggalian artefak (tembikar, adzes) di Galumpang (Kalumpang) yang diyakini berasal dari Akhir Neolitik, fase yang dimulai sekitar 1500 SM di Indonesia Timur.
- e. Temuan-temuan dari kala Pasca-Plestosen dalam gua-gua antara lain, Leang Karassa (Goa Hantu) ditemukan rangka manusia dan alat serpih bilah (pisau atau alat penusuk dibuat dari batu digunakan untuk berburu dan perkakas keperluan rumah tangga) yang merupakan unsur budaya Suku Toala. Di Leang JariE dan PataE, Maros ditemukan lukisan cap tangan yang diperkirakan berumur 40.000 tahun dan lukisan babi berumur 35.000 tahun.

Selain itu, tahun 1921, di Sikendeng, Sampaga, Mamuju, seorang guru menemukan arca Buddha yang terbuat dari perunggu berasal dari mazhab seni Amaravati, India Selatan yang berkembang pada abad ke 2 hingga abad ke 5 Masehi yang menunjukkan adanya hubungan serta pengaruh tertua budaya India di Sulawesi Selatan atau di Indonesia. Di Makassar (Ujung Pandang) ditemukan sebuah kapak yang sangat besar disebut "Kapak Makassar", panjang 70,5 cm terbuat dari perunggu dengan hiasan menyerupai bejana yang dapat diisi air. Di Kampung Rea-rea, Pulau Selayar ditemukan Nekara (Keteltrom) terbesar dan tertua di dunia pada tahun 1686 oleh seorang penduduk yang bernama Sabuna, merupakan peninggalan zaman perunggu, bentuknya menyerupai dandang terbalik, garis tengah bidang pukul berukuran 126 cm dan tinggi 92 cm, gambar bermotif flora dan fauna terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah dan ikan 18 ekor. Sementara dipermukaan gong bagian atas terdapat 4 ekor arca berbentuk kodok dengan panjang 20 cm dan di samping terdapat 4 daun telinga yang berfungsi sebagian pegangan.

Dari hasil penggalian di Makassar, ditemukan gerabah-gerabah (alat memasak yang dibuat dari tanah liat) yang berasal dari Galumpang (Kalumpang) di tepi Sungai Karama, Mamuju yang menyebar ke Maros, Makassar, Takalar, dan Bantaeng. Kalau ditinjau corak gerabah, maka masa perkembangannya mencakup masa bercocok-tanam dan masa perundagian. Pembuatan gerabah tersebut mulai pula ditiru dan dikerjakan penduduk di Jongaya, Gowa termasuk Takalar yang berkembang sampai tahun 1970 dan diperdagangkan di pesisir Sulawesi Selatan dengan sistem barter dengan beras atau padi. Pada tahun 1960-1966, penduduk mengadakan penggalian di beberapa tempat di pesisir Sulawesi Selatan bagian barat seperti di Daerah Pinrang, Polewali, Gowa, Takalar dan beberapa daerah

lainnya dengan kedalaman 0,50 m sampai 2,00 m, ditemukan alat-alat rumah tangga (piring, mangkuk, guci, kendi, basi, cangkir dan lain-lain) yang mempunyai nilai seni, budaya, dan ekonomis yang tinggi yang pada umumnya berasal dari Cina dan Siam.

Hasil dari penggalian ini menunjukkan adanya hubungan dagang dan kebudayaan antara penduduk Sulawesi Selatan dengan bangsa Cina. Di Pulau Barrang Lompo, Makassar, terdapat nisan dari kuburan Islam yang menyerupai menhir (batu tegak sebagai batu peringatan pemujaan arwah leluhur) setinggi 1,50 m yang merupakan tradisi megalitik setelah tradisi bercocok-tanam.

Memasuki masa sejarah, yaitu dengan adanya beberapa catatan-catatan mengenai Sulawesi Selatan antara lain dilakukan oleh Tome' Pires (1513), Pinto (1544), Antonio Galvao, Willem Lodewycksz (1596). Tome' Pires adalah seorang ahli obat-obatan dari Lisbon, Portugis, setelah Malaka ditaklukkan Portugis pada tanggal 24 Agustus 1511, melakukan perjalanan kebeberapa daerah di Indonesia pada tahun 1513-1515, antara lain di Sulawesi Selatan mencatat perjalanannya dalam Suma Oriental yang menyajikan tentang orang Makassar, kemudian oleh Armando Costesao menulisnya dalam Bahasa Inggris dan diterbitkan pada tahun 1944.

Petunjuk berikutnya adalah "tulisan lontara" baik yang dibuat oleh Daeng Pammate pada masa Raja Gowa Tumapa'risi Kallonna (1510-1546), maupun penulis lontara lainnya yang mencatat beberapa kejadian-kejadian penting yang terjadi di dalam Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Dengan jatuhnya Kota Malaka yang merupakan kota pelabuhan dan pusat perdagangan ketangan

Portugis, terjadi perubahan arus pedagang dari Kota Malaka ke beberapa kota-kota di Nusantara, antara lain, Pidie, Jambi, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Tuban, Gresik, Makassar, dan Banda, menjadikan kota. kota tersebut ramai dikunjungi pedagang. Pada waktu Agama Islam mulai masuk di Kerajaan Gowa dan Tallo pada tahun 1605, Makassar yang merupakan Ibukota Kerajaan Gowa menjadi suatu kota yang ramai dengan kedatangan pedagang-pedagang dari berbagai penjuru termasuk bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan disusul kemudian oleh bangsa Belanda yang berhasil menguasai Kerajaan Gowa setelah jatuhnya Benteng Ujung Pandang pada tahun 1667 dan Benteng Somba Opu pada tahun 1669, yang kemudian membentuk sistem pemerintahan kolonial hingga menjadi system pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Regeerings-Reglement 1815 dengan pusat pemerintahan di dalam Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam).

Belanda yang telah menguasai sebagian besar daerah Sulawesi Selatan sejak jatuhnya Benteng Ujung Pandang dan Benteng Somba Opu, mendapat terus perlawanan baik dari raja-raja maupun dari rakyat di Sulawesi Selatan dan tidak pernah putus sampai pecahnya Perang Pasifik pada akhir tahun 1941. Memasuki tahun 1942 di Makassar terjadi perubahan sistem pemerintahan Belanda ke sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Tentara Jepang setelah menduduki seluruh wilayah Indonesia.

Namun pemerintahan yang dijalankan oleh Tentara Jepang hanya berjalan selama 3½ tahun berhubung karena terbentuknya Negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan dicapai

oleh Bangsa Indonesia, rakyat belum dapat menikmati hasil perjuangannya yang telah beratus tahun diperjuangkan. Belanda kembali menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dengan membentuk negara- negara serikat (federal). Makassar dijadikan basis untuk membentuk Negara Indonesia Timur sampai akhirnya Negara Indonesia Timur bubar dengan sendirinya setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan, termasuk bentuk dan susunan pemerintahan Daerah.

Perubahan bentuk dan susunan pemerintahan Daerah dapat dilihat dengan adanya beberapa perubahan peraturan-peraturan tentang Pemerintahan Daerah baik yang ditetapkan dalam undang-undang maupun penetapan presiden, yaitu :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 tentang Pemerintahan Daerah, mulai diberlakukan pada tanggal 13 Maret 1950 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1950.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 17 Januari 1957 tentang
 Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957);
- 3) Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tanggal 30 Januari 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 9);
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959
 (disempurnakan) tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintah Daerah,
 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 129);

- 5) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tanggal 10 Pebruari 1961 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2145);
- 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83);
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Sesuai dengan isi dan tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pemerintahan Daerah terus disempurnakan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menitik beratkan otonomi daerah di Daerah Tingkat II belum dilaksanakan sepenuhnya, hanya dapat berlaku selama 25 tahun, terjadi lagi perubahan setelah adanya reformasi di bidang politik pada tahun 1998 yang melahirkan sistem pemerintahan daerah yang baru, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (LN RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3851). Dalam undang-undang ini, diatur pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kota Makassar berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Desember 2000 ditandai dengan apel seluruh pegawai Pemerintah Kota Makassar di Lapangan Karebosi.

B. Letak Georafis Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia.Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Secara administratif kota makassar adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kota Makassar.Kota Makassar dengan luas wilayah 175,77 km², terletak di pantai barat semenanjung Selatan pulau Sulawesi berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep),
- b. Sebelah Selatan dengan wilayah Kabupaten Gowa,
- c. Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Maros, dan
- d. Sebelah Barat dengan pesisir pantai Selat Makassar. Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kota Makassar terletak antara 119°24"17"38" Bujur Timur dan 5°8"6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelahutara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 996 RW dan 4968 RT. Penduduk kota Makassar tahun 2016 tercatat sebagai 1.449.401 jiwa yang terdiri dari 717.047 laki-laki dan 732.354 perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,45 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,37 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,91. Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2016 mencapai 8.246 jiwa/km2 dengan ratarata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang.

Kepadatan penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 33.490 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.481 jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,96 persen dari tahun 2015.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Makassar,2016.

			ussui,2010.		
NO	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	_ Jenis Kelamin
1	Mariso	29 564	29 251	58 815	101,07
2	Mamajang	29 757	31 022	60 779	95,92
3	Tamalate	94 571	96 123	190 694	98,39
4	Rappocini	78 724	83 815	162 539	93,93
5	Makassar	41 817	42 579	84 396	98,21
6	Ujung Pandang	13 347	14 931	28 278	89,39
7	Wajo	15 041	15 681	30 722	95,92
8	Bontoala	27 435	28 808	56 243	95,23
9	Ujung Tanah	24 598	24 284	48 882	101,29
10	Tallo	69 446	69 152	138 598	100,43
11	Panakkukang	72 720	74 248	146 968	97,94
12	Manggala	67 680	67 369	135 049	100,46
13	Biringkanaya	97 948	98 664	196 612	99,27
14	Tamalanrea	54 399	56 427	110 826	96,41
Jum	lah	717 047	732 354	1 449 401	97,91

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota makassar Tahun 2016

C. Pendidikan Penduduk

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia suatua Negara akan menentukan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Pada tahun 2015/2016 di kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 489 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.865 orang dan jumlah murid sebanyak 145.300 orang. Jumlah SLTP sebanyak 192 unit dengan guru sebanyak 3.984 orang dan murid mencapai 62.758 orang. Jumlah SLTA 262 unit dengan jumlah guru sebanyak 3.772 orang dengan jumlah murid sebanyak 73.367 orang.

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah,Murid,Guru dan Rasio Murid-Guru di kota Makassar Tahun 2016

No	Tingkatan Sekolah	Jumalah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid- Guru
1	SD/MI	489	145.300	6.865	21,17
2	SLTP	192	62.758	3.984	15,75
3	SLTA	262	73.367	3.772	19,45
Jumlah		943	281.425	14.621	56,37

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS)Kota Makassar,2016

D. Agama Penduduk dan Sarana Beribadah

Mayoritas penduduk Makassar adalah pemeluk agama Islam, terdapat banyak bangunan Masjid sebagai sarana peribadatan bagi umat Muslim. Pada tahun 2016 jumlah Masjid sebanyak 1.218 Masjid. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja 143 buah gereja. Tempat peribadatan untuk agama Buddha 1, Hindu berjumlah 26, dan klenteng untuk Agama Konghucu 1 buah. Disamping itu juga terdapat berbagai upacara-upacara adat yang berhubungan dengan nilai keagamaan, misalnya saja setiap anak yang lahir dilangsungkan acara-acara yang

berhubungan dengan keagamaan, dimana dalam beberapa hari sesudah bayi dilahirkan, dilakukan upacara member nama yang dikenal dengan "aqikah" yakni penyembelihan hewan oleh Orang Tua sang bayi.

Makassar sebagai salah satu Kota besar yang memiliki sifat penduduk yang heterogen baik dari segi agama, suku, dan budaya, adanya sifat heterogenitas ini pula yang dapat memungkinkan timbulnya banyak masalah-masalah sosial, untuk itu selalu dibutuhkan toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antar umat beragama agar terciptanya suasana masyarakat yang integratif. Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam meningkatnya keimanan dan ketakwaan, makin meningkatnya kerukunan hidup beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan, tingkat, keimanan dan ketakwaan masing-masing pemeluk agama, serta sikap toleransi antar umat beragama yang menggambarkan kerukunan antar pemeluk agama dan senantiasa menciptakan suasana yang selalu aman serta kondusif.

Tabel 4.3 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama di Kota Makassar,2016

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1.218
2	Gereja Protestan/Khatilik	143
3	Pura	2
4	Wihara	26
5	Klenteng	1

Sumber:Badan Pusat Statistik(BPS)Kota Makassar, 2016

E. Sarana dan Prasarana

Kota Makassar bisa dikategorikan sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebab Makassar memiliki banyak sarana perekonomian yang terbuka tiap harinya. Yakni Shopping Mall, Rumah Bernyanyi, Supermarket dalam ukuran besar maupun kecil, berbagai industri, took- toko, dan juga termasuk pasar serta pedangang kecil-kecilan. Sarana Jalan di sepanjang kota Makassar tengah dilakukan upaya alternatif jalan dengan melakukan pelebaran badan jalan dan penambahan jembatan layang atau fly over dan bundaran di depan bandara sultan hasanuddin yang dibangun untuk meretas kemacetan yang hampir terjadi tiap harinya. Sedangkan untuk saran komunikasi, penduduk kota Makassar telah difasilitasi dengan beragam pemancar untuk jaringan telivisi, radio dan telepon.